

Pengaruh Dana desa, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan

Suherman ✉ Junaidin Zakaria ✉ Dahlia Baharuddin ✉

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana desa terhadap Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan. (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan, (3). Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis Regresi data Panel, dengan jumlah sampel sebanyak 24 kabupaten Kota di Sulawesi selatan. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai probabilitasnya $0,000 < 0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan jumlah dana desa sebesar satu satuan dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,85 satuan.(2) Pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -5,47 dengan nilai probabilitas sebesar 0,837 yang berarti pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh nilai PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan karena nilai probabilitas $0,837 > 0,05$. (3). Pengeluaran pemerintah (PP) sebesar -6,64 dengan nilai probabilitas 0,054 menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan.*

Abstract

This research was conducted with the following objectives: (1) To identify and analyze the effect of village funds on poverty levels in South Sulawesi. (2) To know and analyze the influence of GRDP on the poverty rate in South Sulawesi, (3). To know and analyze the effect of government spending on poverty levels in South Sulawesi. The research method used in this study is descriptive analysis and panel data regression analysis, with a total sample of 24 districts and cities in south Sulawesi. Based on the results of panel data regression analysis, the results showed that (1). Village funds have a negative and significant impact on the poverty level because the probability value is $0.000 < 0.005$ so it can be said that every increase in the amount of village funds by one unit can cause a decrease in the poverty rate by 6.85 units. (2) Economic growth (GRDP) is -5, 47 with a probability value of 0.837, which means that economic growth described by the GRDP value has a negative but not significant effect because the probability value is $0.837 > 0.05$. (3). Government spending (PP) of -6.64 with a probability value of 0.054 illustrates that government spending has a negative but not significant effect on reducing poverty levels in South Sulawesi.

Keywords: *Village Funds, GRDP, Government Expenditures, Poverty.*

Copyright (c) 2024 Suherman

✉ Corresponding author : suherman@gmail.com

Email Address : suherman@gmail.com, junaidin.zakaria@umi.ac.id, dahlia.baharuddin@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada tahun 2018 memperkenalkan sebuah indeks komposit yang mampu menjelaskan capaian inklusifitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Indikator tersebut tersusun atas 3 (tiga) pilar yakni pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Performa pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia jika dilihat dari capaian ketiga pilar tersebut masih sangat tertinggal pada aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar ini menggambarkan capaian dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan ketersediaan infrastruktur ekonomi di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas (2022) memperlihatkan bahwa pada skala 1-10, capaian untuk pilar ini hanya sebesar 5.29 pada tahun 2021. A.A. Ngurah Gede Wasudewa, Doddy Aditya Iskandar, (2022). Pada tataran ekonomi makro, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilisasi harga dan membuka lapangan kerja. Pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur daerah tertinggal sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut dapat lebih bergerak maju. (N. M. Rida, Mursalin, and A. Nurwanah 2023). Lahirnya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan harapan bagi semua pihak, dengan adanya pemberian stimulus ekonomi dalam bentuk dana desa. Berdasarkan data di tabel 1, menunjukkan bahwa dalam tahun 2020, masih terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat serapan dana desa yang masih sangat rendah yaitu antara 23-46%. Hal ini menjadi fenomena tersendiri bagi pemerintah setempat dalam memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Secara keseluruhan dalam tahun 2020 ini, daya serap dana desa di Sulawesi selatan hanya mencapai 65,46%.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Penyerapan Dana Desasebesar Rp1,54 triliun atau 65,46% dari total penyaluran dana desa. Dari penyerapan dana desa tersebut capaian output bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 97%, bidang pelaksanaan pembangunan desa 91%, bidang pembinaan kemasyarakatan desa 89%, bidang pemberdayaan masyarakat desa 93% dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa 96%. Tujuan Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Untuk itulah maka fenomena lainnya yang terkait penelitian ini adalah fenomena kemiskinan di Sulawesi selatan seperti terdapat dalam tabel dibawah ini.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan (Ribuan Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	17,590	16.93	17.04	16.93	16.74
Bulukumba	31,250	31.31	30.00	31.31	31.29
Bantaeng	17,200	17.78	16.84	17.78	17.22
Jeneponto	55,950	52.35	53.24	52.35	50.59
Takalar	26,570	24.60	25.38	24.60	24.75
Gowa	59,340	58.66	57.68	58.66	57.96
Sinjai	22,480	21.69	22.06	21.69	21.67
Maros	35,970	34.11	34.62	34.11	33.90
Pangkep	50,120	48.40	47.12	48.40	47.53
Barru	15,680	15.18	14.44	15.18	14.73
Bone	79,570	79.64	81.33	79.64	80.34
Soppeng	17,000	17.27	17.23	17.27	17.21
Wajo	29,730	26.22	27.69	26.22	26.75
Sidrap	15,410	15.25	15.36	15.25	15.56
Pinrang	32,940	33.51	33.56	33.51	33.64
Enrekang	22,530	26.13	25.25	26.13	26.15
Luwu	47,910	46.26	46.04	46.26	46.50
Tana Toraja	29,650	29.33	28.41	29.33	29.31
Luwu Utara	42,430	43.15	42.20	43.15	42.29
Luwu Timur	21,150	20.99	20.82	20.99	20.89
Toraja Utara	30,680	28.39	27.88	28.39	27.79
Makassar	66,22	74.69	69.98	74.69	71.83
Pare Pare	8,010	7.93	7.96	7.93	8.01
Palopo	14,270	15.21	14.71	15.21	14.78
SULAWESI SELATAN	792,640	784.98	776.83	784.98	777.44

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi selatan 2018/2022

Sumber data : BPS 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Tabel 3. PDRB Kab/Kota di Sulawesi Selatan (ADHB)

NO	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kep. Selayar	5,857,277.93	6,442,677.32	6.392,74	6.835,40	7.480,47
2	Bulukumba	13,198,917.32	14,214,593.94	14.565,49	15.868,86	17.233,31
3	Bantaeng	7,769,501.82	8,781,044.54	8.970,48	10.081,40	12.164,14
4	Jeneponto	9,416,911.73	10,089,861.29	10.288,56	11.053,25	11.779,83
5	Takalar	9,324,821.98	10,157,346.94	10.220,31	11.126,11	12.257,05
6	Gowa	19,071,982.68	20,938,874.38	21.531,88	23.536,84	25.611,85
7	Sinjai	10,163,057.33	10,960,624.79	11.325,05	12.297,08	13.530,37
8	Maros	21,311,332.10	22,717,974.51	18.621,55	19.005,61	23.544,30
9	Pangkep	23,944,893.27	25,990,112.20	25.662,55	27.574,74	30.481,86
10	Barru	6,614,101.75	7,271,220.83	7.432,30	8.057,26	8.878,37
11	Bone	33,120,526.60	36,034,719.98	36.560,64	39.369,96	43.640,84
12	Soppeng	10,005,938.30	10,937,387.99	11.38,12	12.426,78	13.741,84

13	Wajo	18,709,890.44	19,838,813.53	19.773,05	22.319,74	24.352,78
14	Sidrap	12,937,370.32	13,893,724.49	14.073,43	15.250,13	16.699,00
15	Pinrang	18,087,778.99	19,630,319.95	20.083,01	21.758,58	23.765,15
16	Enrekang	6,719,799.76	7,298,244.01	7.528,64	8.204,11	9.025,31
17	Luwu	14,441,940.32	15,657,617.51	16.031,07	17.839,99	19.980,97
18	Tana Toraja	6,824,872.59	7,479,773.62	7.571,14	8.087,09	8.757,44
19	Luwu Utara	11,999,256.50	13,047,331.17	13.237,25	14.408,38	16.050,74
20	Luwu Timur	20,393,893.93	20,996,749.61	21.529,81	23.614,52	28.407,91
21	Toraja Utara	8,696,497.07	9,596,352.48	9.721,43	10.344,30	11.311,31
22	Makassar	160,207,659.28	178,430,057.22	178.332,99	190.318,07	208.935,79
23	Parepare	6,602,362.55	7,230,401.13	7.323,65	7.826,31	8.697,28
24	Palopo	7,285,142.35	7,942,481.04	8.025,29	8.714,31	9.767,89

umber data: BPS Sulawesi Selatan 2020

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (N. Muhammad, A. Rahman Mus, and A. Nurwanah, 2022). PDRB dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai kondisi perekonomian di suatu wilayah. PDRB diperoleh melalui perhitungan total nilai produk dan layanan yang diproduksi oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah Kurnia Sari dan Leonita (2019). PDRB terbagi dua yaitu atas dasar harga berlaku yang dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga berlaku merupakan dasar untuk mengukur kemampuan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB harga konstan digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi per tahun tanpa terpengaruh pada faktor harga. Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas daratan 45.519.24 km persegi, terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota. Tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dewasa ini antara lain bagaimana menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, dengan adanya dana desa tersebut (R. Haeruddin, J. Zakaria, and A. Erfah). Dengan adanya dana desa, maka diharapkan dapat memberikan efek terhadap menurunnya angka kemiskinan di pedesaan. Penelitian yang menemukan hubungan linieritas antara dana desa dengan menurunnya tingkat kemiskinan antara lain dilakukan oleh Arfiansyah (2020), Osmet (2020), Sri Mulatsih (2019), Indriani (2020), Sigit (2020), Ritonga, dan Wulantika 2020, Sunu Kalpika dan Utama (2019). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat hubungan yang negatif antara dana desa dengan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya dana desa memberikan efek yang positif bagi kemiskinan di pedesaan.

Selain dana desa, yang memberikan efek terhadap kemiskinan, maka salah satu indikator yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB. Hal ini dapat terdeteksi dalam beberapa penelitian antara lain, Penelitian yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan adalah penelitian dari

Arfah Aryati, dan Mapparenta (2020), Ishak Robby, Zakaria Junaidin dan M. Arifin (2020) juga menemukan hasil yang sama. sedangkan penelitian Azwar dan Achmat Subekan dalam penelitiannya analisis determinan kemiskinan di Sulawesi selatan, (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Anton Tri Wijayanto (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. dan Padmiati (2017), bahwa dimensi budaya memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. Data Belanja Daerah Kabupaten Kota di Sulawesi selatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.4. Total Pengeluaran Pemda Kab/Kota di Sulawesi selatan

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	17,027,020,838	16.914.518.141	17.713.428.170	18.724.421.387
Belanja Langsung	17,354,551,013	16.556.538.890	14.340.670.722	17.873.089.077
Pembiayaan Daerah	200,066,117	391.911.079	267.089.174	302.976.301
Jumlah	34,484,469,180	33.862.968.110	32.321.188.066	36.900.486.765

Sumber data BPS Sulsel 2023.

Pada tahun anggaran 2018, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Provinsi se Sulawesi Selatan adalah sebesar 34,484,469.180 ribu rupiah, dimana 17,027,020.838 ribu rupiah (49,24%) diantaranya merupakan pengeluaran/belanja Tidak Langsung Daerah, 17,354,551.013 ribu rupiah (50,18 %) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II (Kabupaten/Kota) se Sulawesi Selatan dan 200,066.117 ribu rupiah (0,57 %) adalah Pembiayaan Daerah. Beberapa belanja daerah yang menjadi tolak ukur untuk mengukur jumlah angka kemiskinan di suatu daerah antara lain Belanja Daerah Urusan Pendidikan Belanja Daerah Urusan Kesehatan Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Pertanian dan program pemberdayaan masyarakat, Siregar (2020).

N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan (2022). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan fungsi maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Tuasela (2019), dalam penelitiannya menemukan hubungan positif signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Mimika. Siregar (2020), juga menemukan adanya hubungan positif signifikan antara belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Utara.

METODOLOGI

Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap...

- 1) Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Arikunto (2006) juga menambahkan, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan jenis pendekatan penelitian yaitu: waktu dan dana yang tersedia, dan minat peneliti. Hal-hal yang dikemukakan Arikunto tersebut yang melatarbelakangi dipilihnya pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini.

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung, antara lain data Dana Desa, data Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah.
- 2) Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan sebagai pendukung dalam rencana penelitian.

Sedangkan dilihat dari cara memperolehnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :

Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan non verbal pada objek penelitian.

Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang diteliti. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terbaru pada Kementrian Keuangan, (DJPB) Badan Kajian Fiskal Nasional, Kajian FIskal Regional, dan Badan Keahlian DPR-RI. Data yang digunakan merupakan data pool/data panel yaitu kombinasi dari data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Pagu Dana Desa kabupaten se Sulawesi selatan
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018-2022.
- 3) Pengeluaran Pemerintah pada kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tahun tahun 2018-2022.
- 4) Data Kemiskinan pada Kabupaten di Sulawesi selatan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dari lembaga/instansi terkait.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian (metode sampel jenuh atau sensus).

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif merupakan teknik yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar rata-rata data yang diobservasi berdeviasi terhadap sederetan data yang membentuk rata-rata tersebut. Dengan perkataan lain, seberapa jauh nilai rata-rata tersebut “representatif” (mewakili). Maksimum digunakan untuk mengetahui nilai maksimum data yang diobservasi. Minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil data yang diobservasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji pengaruh Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan kabupaten se- Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut: $\text{Tingkat Kemiskinan} = f(\text{DD}, \text{PDRB}, \text{PP})$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model regresi panel seperti telah diuraikan di bab sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah EViews versi 10.0. berdasarkan hasil pengolahan data yang melalui pengujian kesesuaian model diperoleh bahwa model fixed effect model adalah model yang paling sesuai digunakan. Hasil pengolahan datanya ditunjukkan berikut ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa:

1. Secara simultan model analisis menunjukkan bahwa variabel dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan 5% atau pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini ditunjukkan dari nilai uji signifikansi simultan, prob (F-statistik) sebesar $0,000 < 0,005$.
2. Nilai adjusted R Squared sebesar 0,995 (99,5%) mengandung arti bahwa variasi perubahan variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah sebesar 99,5% sedangkan sisanya sebesar 0,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis.

Tabel Hasil Uji Model Regresi Panel

Dependent Variable: TK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/27/21 Time: 16:57				
Sample: 2017 2020				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 21				
Total panel (balanced) observations: 84				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.79817	1.073979	37.98788	0.0000
DD	-6.85E-11	1.05E-11	-6.503640	0.0000
PDRB	-5.47E-11	2.66E-10	-0.205800	0.8376
PP	-6.64E-13	3.39E-13	-1.960314	0.0546
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.996097	Mean dependent var	32.95238	
Adjusted R-squared	0.994601	S.D. dependent var	16.29983	
S.E. of regression	1.197630	Akaike info criterion	3.433522	
Sum squared resid	86.05900	Schwarz criterion	4.128041	
Log likelihood	-120.2079	Hannan-Quinn criter.	3.712713	
F-statistic	665.8450	Durbin-Watson stat	1.719878	
Prob(F-statistic)	0.000000			

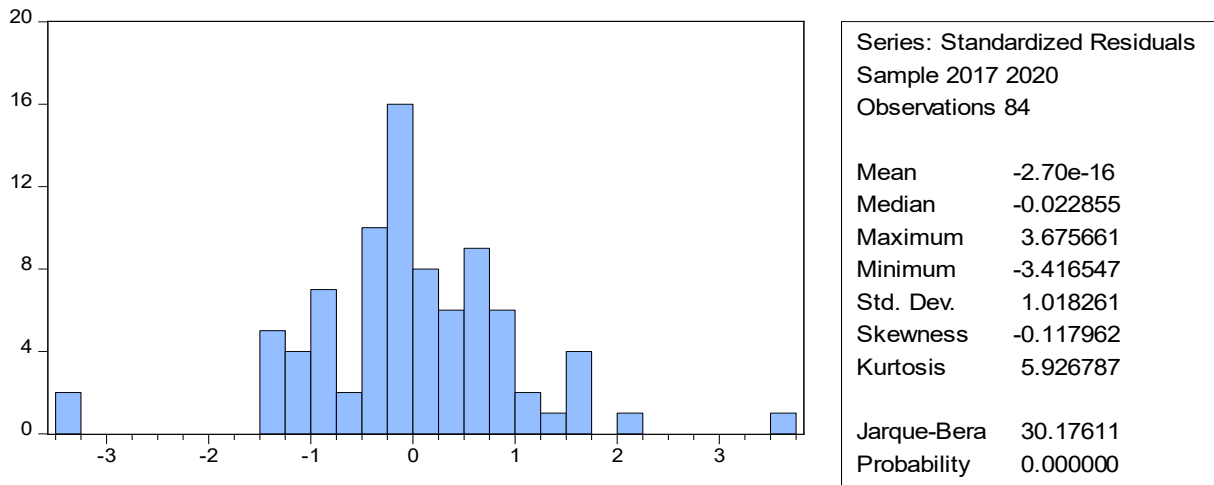
Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2023

- Secara parsial dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel dana desa (DD) sebesar -6,85 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, hal ini menggambarkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai probabilitasnya $0,000 < 0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan jumlah dana desa sebesar satu satuan dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,85 satuan.
- Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -5,47 dengan nilai probabilitas sebesar 0,837 yang berarti pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh nilai PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan karena nilai probabilitas $0,837 > 0,05$. Artinya walaupun setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,47 satuan tetapi pengaruhnya tidak signifikan atau tidak nyata.
- Nilai koefisien pengeluaran pemerintah (PP) sebesar -6,64 dengan nilai probabilitas 0,054 menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uji kesesuaian model tersebut, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik normal probability Plot. Pada pendekatan ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.



Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ternyata data tidak berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

	DD	PDRB	PP
DD	1.000000	0.402864	0.390213
PDRB	0.402864	1.000000	0.454887
PP	0.390213	0.454887	1.000000

Nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinearitas adalah 70 persen atau 80 persen (0,7 atau 0,8). Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa semua nilai korelasi dari variabel bebas lebih kecil dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel penelitian tersebut. Dengan hasil ini maka satu uji asumsi klasik telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.115363	Prob. F(9,74)	0.3629
Obs*R-squared	10.03370	Prob. Chi-Square(9)	0.3478
Scaled explained SS	11.95843	Prob. Chi-Square(9)	0.2157

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/27/23 Time: 18:18

Sample: 1 84

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-49.18381	133.1533	-0.369377	0.7129
DD^2	-8.53E-21	7.80E-21	-1.093365	0.2778
DD*PDRB	-4.48E-19	5.00E-19	-0.894274	0.3741
DD*PP	1.10E-21	2.02E-21	0.544873	0.5875
DD	6.86E-10	1.84E-09	0.372191	0.7108
PDRB^2	7.41E-17	5.13E-17	1.444131	0.1529
PDRB*PP	-3.33E-20	1.18E-19	-0.281289	0.7793
PDRB	-6.46E-08	1.43E-07	-0.451635	0.6529
PP^2	-4.65E-23	4.40E-23	-1.056058	0.2944
PP	1.63E-10	1.31E-10	1.243401	0.2176
R-squared	0.119449	Mean dependent var		115.0646
Adjusted R-squared	0.012355	S.D. dependent var		187.6520
S.E. of regression	186.4892	Akaike info criterion		13.40597
Sum squared resid	2573588.	Schwarz criterion		13.69535
Log likelihood	-553.0506	Hannan-Quinn criter.		13.52230
F-statistic	1.115363	Durbin-Watson stat		0.979198
Prob(F-statistic)	0.362883			

Sumber: Hasil Pengeolahan EViews 10.0, 2023

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode white, nilai prob nya sebesar $0,347 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Breusch-Godfrey, dimana jika nilai prob $< 0,05$ maka terjadi gejala autokorelasi sedangkan jika nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati.

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	18.81896	Prob. F(2,78)	0.0000
Obs*R-squared	27.34038	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/27/23 Time: 18:16

Sample: 1 84

Included observations: 84

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.984814	2.557888	0.385010	0.7013
DD	-2.81E-12	1.92E-11	-0.146740	0.8837
PDRB	-4.88E-10	1.67E-09	-0.292749	0.7705
PP	-1.64E-13	1.98E-12	-0.082690	0.9343
RESID(-1)	0.636887	0.112862	5.643040	0.0000
RESID(-2)	-0.129772	0.114332	-1.135044	0.2598
R-squared	0.325481	Mean dependent var		-6.30E-15
Adjusted R-squared	0.282242	S.D. dependent var		10.79124
S.E. of regression	9.142403	Akaike info criterion		7.332473
Sum squared resid	6519.515	Schwarz criterion		7.506103
Log likelihood	-301.9639	Hannan-Quinn criter.		7.402270
F-statistic	7.527583	Durbin-Watson stat		1.985253
Prob(F-statistic)	0.000008			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews, 2023

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Memperhatikan hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai probabilitasnya $0,000 < 0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan jumlah dana desa sebesar satu satuan dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,85 satuan. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti secara empiris dan dapat diterima.
2. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -5,47 dengan nilai probabilitas sebesar 0,837 yang berarti pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh nilai PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan karena nilai probabilitas $0,837 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti secara empiris dan dapat diterima.
3. Pengeluaran pemerintah (PP) sebesar -6,64 dengan nilai probabilitas 0,054 menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dengan demikian hipotesis ketiga terbukti secara empiris dan dapat diterima.

Pembahasan

Hasil analisis data yang telah dilakukan dan pengujian hipotesis memberikan informasi dan temuan empiris yang menggambarkan bahwa variasi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijelaskan dengan baik oleh jumlah dana desa, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan besaran pengeluaran pemerintah.

Pengaruh Dana Desa Terhadap tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Bentuk hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah negatif yang berarti besaran dana desa yang dikucurkan ke desa memberikan efek yang berlawanan dengan tingkat kemiskinan. Semakin besar dana desa yang diterima maka tingkat kemiskinan semakin menurun.

Temuan penelitian ini mendukung beberapa penelitian seperti Arfiansyah (2020), Osmet (2020), Sri Mulatsih (2019), Indriani (2020), Sigit (2020), Ritonga, dan Wulantika (2020), Sunu Kalpika dan Utama, (2019). Wahyuddin, (2020). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat hubungan yang negatif antara dana desa dengan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya dana desa memberikan efek yang positif bagi kemiskinan di pedesaan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Julia dkk (2021). Gusti, (2020), bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Dana Desa dengan penurunan KK miskin atau peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Yang menemukan pengaruh dana desa secara positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Temuan Muslim (2020), bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan dengan kemiskinan. Artinya Dana desa belum efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini tentunya sangat diametral dengan beberapa teori seperti Neo-liberal dan Sosial Demokrasi. Menurut teori ini, Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Begitu pula dengan teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan structural. Penelitian dari Pusat Studi Anggaran Badan Keahlian DPR-RI (2021), menemukan bahwa Dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia sudah memberikan hasil yang positif untuk pembangunan desa, baik itu prasarana fisik maupun non fisik. Aghnia, N. L. (2018), maupun penelitian Sigit (2020), mengemukakan dalam penelitiannya, walaupun sudah menunjukkan pengaruh yang baik dalam penggunaannya, dana desa belum berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan

Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa walaupun bentuk hubungan variabel telah sesuai dengan teori tetapi pengaruhnya belum nyata. Dalam Teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Didalam teori dijelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Agussalim (2012), juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dianalogikan dengan air pasang akan mengangkat sampan-sampan nelayan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian seperti Leonita (2019), Wulantika (2020). Wijayanto (2016), Penelitian terkait adalah Aan Julia dkk (2021), Amali (2017), Ishak, Junaidin Zakaria, M. Arifin (2020) yang menemukan adanya hubungan positif-signifikan, namun berbeda dengan penelitian Sembiring dkk (2020) yang menemukan hubungan negative signifikan antara PDRB dengan tingkat kemiskinan. Azwar dan Achmat Subekan (2016). Variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan (KM).

Temuan ini juga menjustifikasi teori dan berbagai skematisasi temuan dan pandangan seperti pandangan Zakaria J. (2018:26) yang membagi kemiskinan menjadi tiga pengertian: (1) Kemiskinan relatif (seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih dibawa kemampuan masyarakat sekitarnya). (2) Kemiskinan cultural (kemiskinan cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya) dan (3) Kemiskinan absolute (kemiskinan absolute yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Hal ini telah sejalan dengan teori Wagneer yang mengemukakan bahwa makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Dalam teori Peacock dan Wiseman mendasarkan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Surgawati (2020), dalam penelitiannya yang menguji teori Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner dengan objek penelitian di Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia, karakteristik daerah, struktur urban serta krisis ekonomi berpengaruh signifikan, sementara variabel tenaga kerja, kualitas kelembagaan dan perkembangan demokrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pengeluaran total berpengaruh signifikan, sedangkan karakteristik daerah, Krisis keuangan, kualitas kelembagaan dan perkembangan demokrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Pola perekonomian Provinsi Jawa Barat cenderung mengikuti teori Wagner.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar (2020), Bandiyonob Rizki Syamsuri (2020), Naylal Fithri David Kaluge (2017), Nurullzzati (2018), Muthiah Izzaty (2020). Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun belanja pemerintah disetiap tahun APBD selalu melebihi tingkat pendapatan (PAD), namun hasil dari peningkatan tersebut belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini juga dapat dijustifikasi dari postur anggaran Negara dengan sistem belanja defisit, dimana celah deficit dapat diketahui dengan cara melakukan pinjaman, atau difersifikasi dalam instrument moneter maupun instrument fiscal.

sehingga hal ini memicu perlawanan dalam teori Peacock dan Wiseman, bahwa masyarakat akan tidak percaya dengan pemerintah, sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi pembayaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai probabilitasnya $0,000 < 0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan jumlah dana desa sebesar satu satuan dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,85 satuan. 2). Pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -5,47 dengan nilai probabilitas sebesar 0,837 yang berarti pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh nilai PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan karena nilai probabilitas $0,837 > 0,05$. 3). Pengeluaran pemerintah (PP) sebesar -6,64 dengan nilai probabilitas 0,054 menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Referensi :

- Andy, R. (2020). Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Annisa, S., & Seftarita, C. (2019). Pengaruh Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 356-363.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91-106.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Pdrb Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445-469.
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet, O. (2020). Pemanfaatan dana desa dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 265-285.
- Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2022). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar. *Tata Kelola*, 9(1), 78-87.
- Ondang, J. I., Masinambow, V. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal Terhadap PDRB Serta Dampaknya Pada Angka Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(1), 52-65.
- Qudri, M., & Sari, C. P. M. (2024). PENGARUH DANA DESA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI 23 KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(2), 22-32.
- Rachman, A., Kornita, S. E., & Tampubolan, D. (2023). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2016–2020. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 408-421.
- Ramadhina, S., & Syafitri, W. (2024). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA DESA DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2).
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan

- ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 278-290.
- Ritonga, M., & Wulantika, T. (2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018). *Jurnal Diversita*, 6(1), 95-102.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1-13.
- Surgawati, I. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 25-34.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di jawa timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526.
- Wahyuddin, W., Ramly, A. R., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 1-12.